

DAFTAR PUSTAKA

- Bupati Purworejo. (2017). Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 9 Ayat 3 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15*. Purworejo.
- Firman, Z. (2021). *sistem pemungutan pajak yang berlaku*. Dari <https://flaztax.com/2021/02/16/pelajari-3-jenis-sistem-pemungutan-pajak-yang-berlaku/>
- Hasibuan. (2010). *Pengertian struktur organisasi menurut para ahli*. Dari <https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-struktur-organisasi-menurut-para-ahli/>
- Idris, M. (2021). *Pengertian Pajak: Fungsi, Karakteristik, dan Jenis-jenisnya*. Dari <https://money.kompas.com/read/2021/06/17/151506626/pengertian-pajak-fungsi-karakteristik-dan-jenis-jenisnya?page=all>
- Mulyani, S. D., & Furqon, K. I. (2021). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pematang Jaya. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 68. <https://aktiva.nusaputra.ac.id/article/view/125>
- OnlinePajak. (2017). *Asas Pemungutan Pajak dan Penerapannya di Indonesia*. Diambil 16 April 2023, dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/asas-pemungutan-pajak-dan-penerapannya-di-indonesia>
- Prof Dr. Rochmat Soemitro, S. (2013). *Perpajakan Edisi revisi 2013*. Jakarta: Indonesia Onesearch.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 3 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 81 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 dan 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049*. Jakarta.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 78 Ayat 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049*. Jakarta.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 79 Ayat 1 dan 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049*. Jakarta.

Rukmini, D. (2023). *Lampaui Target, Realisasi PAD Sektor Pajak Daerah Tahun 2022 di Purworejo Capai Rp 100Miliar*. Purworejo: Muhammad Fatoni. Dari <https://jogja.tribunnews.com/2023/01/11/lampaui-target-realisasi-pad-sektor-pajak-daerah-tahun-2022-di-purworejo-capai-rp100-miliar>